



## PEMBENTUKAN PROPAKTANI DI DESA LAMBUSA UNTUK MEMPERKUAT PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nitri Mirosea<sup>1</sup>, Yos Hasrul<sup>2</sup>, Husin<sup>3</sup>, Irmawati Tamburaka<sup>4</sup>, Wali Aya<sup>5</sup>,  
Yuli Lestari<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Univeristas Halu Oleo, Indonesia

<sup>2</sup>Perusahaan Daerah Konawe Selatan, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>6</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: nitri.mirosea@uho.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Globalisasi ekonomi dan gelombang Revolusi Industri 4.0 yang mendunia dan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia dalam sektor ekonomi. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, faktor terpenting adalah sumber daya manusianya (*human capital* atau *intellectual capital*) disamping teknologi, institusi, pemasaran dan pembiayaan (UNDP, 2013). Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan para pemangku kepentingan perusahaan, konsep tanggung jawab sosial tampaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Satrio, 2015). Untuk keberlanjutan program perlunya mengintrodusir pelaku UMKM desa dan stakeholders pembangunan desa lainnya mengenai Aksesibilitas pasar, memberi pengetahuan pasar online serta penguatan kelompok tani melalui korporasi tani. Hasil dari pendampingan desa binaan dan CSR maka terbentuklah korporasi kelompok Petani. (PROPAKTANI) di Desa Lambusa sebagai langkah awal penetrasi pasar online.

**Kata Kunci:** CSR, korporasi kelompok tani, pemasaran

### PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan gelombang Revolusi Industri 4.0 yang mendunia dan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia dalam sektor ekonomi. Munculnya wabah global COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat



berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari.

Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tenggara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat terus melakukan upaya-upaya dalam percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota /kabupaten menjalin kerja sama dalam menangani Dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jika tidak segera ditangan diprediksi akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021 dan tahun 2022. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mitra pembangunan di Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Sebagai daerah yang perekonomiannya didominasi oleh migas dan tambang, maka Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengoptimalkan sektor non migas yang dapat menumbuhkan ekonominya. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota/Kabupaten perlu dan wajib menyiapkan segala bentuk sarana/prasarana termasuk kesiapan sumber daya manusia untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic dan menyongsong globalisasi ekonomi.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa, pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana keuangan tahunan desa. APB Desa tidak hanya dijadikan acuan oleh pemerintahan desa, melainkan menjadi syarat untuk pencairan dana desa termin pertama. Penyusunan APB Desa disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang dari sisi tataran teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses penganggaran.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Kemudian yang terjadi saat ini adalah pandemi Covid-19 yaitu sebuah



penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Adanya pandemi ini membawa banyak dampak terutama dampak negatif, mulai dari segi kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain (Adrian, 2020). Dalam pemerintah desa, dituntut untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran melalui jaring pengaman sosial. Desa wajib memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Penelitian ini juga membahas tentang pandemi Covid-19 yang membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya menyebabkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 yang digunakan untuk instrumen *refocusing* anggaran guna adanya fokus pembiayaan pada penanggulangan pandemi Covid-19 dan mengatasi masalah ekonomi serta menghindarkan Indonesia pada jurang resesi ekonomi. Aturan ini sebagai dasar untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Melalui realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, pemerintah dapat melakukan program untuk mempercepat penanganan pandemi, melakukan revisi anggaran dan program pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanganan pandemi.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) muncul sebagai akibat dari kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami setiap perusahaan adalah mencari keuntungan maksimum yang mungkin terlepas dari kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan para pemangku kepentingan perusahaan, konsep tanggung jawab sosial tampaknya menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Satrio, 2015).

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang, terutama kelompok yang rentan dan rentan, untuk (a) memiliki akses ke sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan layanan yang mereka butuhkan (b) berpartisipasi dalam proses pengembangan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Aziz et al., 2020).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, menarik bagi kami mengkaji lebih jauh mengenai “Pembentukan Propaktani (Korporasi Kelompok Petani) Di Desa Lambusa Untuk Memperkuat Hasil Penelitian”.

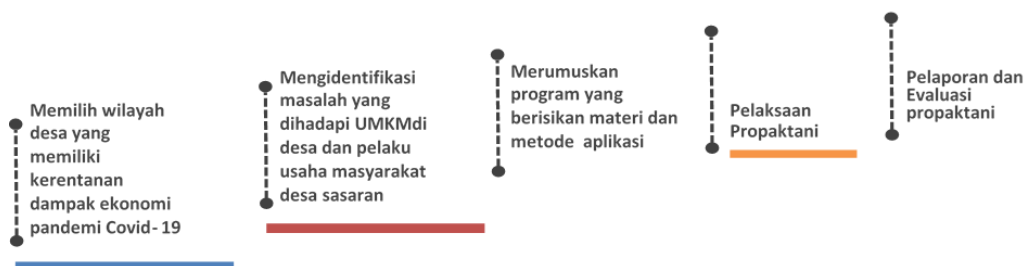
## METODE

### A. Persiapan

Pelaksanaan CSR Perusda Kab. Konsel diawali dengan persiapan. Persiapan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu: penentuan target pengembangan UMKM, diskusi tentang topik Desa Binaan dan penyusunan proposal. Kegiatan persiapan tidak luput juga perumusan materi yang relevan dengan permasalahan pemerintah desa dan pelaku usaha/masyarakat saat ini akibat pandemi Covid-19 dan menentukan narasumber yang relevan dan berkompeten.

### B. Pelaksanaan

Pelaksanaan CSR Perusda Kab. Konsel terdiri dari lima tahapan mulai dari penentuan wilayah sasaran kegiatan, identifikasi desa sasaran kegiatan, perumusan metode penanganan masalah, pelaksanaan sosialisasi dan terakhir evaluasi dan penyusunan laporan. Tahapan kegiatan Desa Binaan digambarkan dalam flow chart berikut:





Seluruh rangkaian kegiatan di atas dikerjakan oleh 15 orang Tim Dosen dan Mahasiswa selama Bulan Juli hingga Desember termasuk kegiatan persiapan. Setiap anggota Tim memiliki jam kerja efektif (JKEM) rata-rata 151 jam per bulan. Jenis kegiatan, program dan JKEM dikemukakan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Rincian Kegiatan dan Program

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1	Sosialisasi dan penyediaan data jumlah	Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data		
2	Pembentukan Propaktani	Membentuk Kelompok tani/korporasi tani sayur		
3	Pembentukan Propaktani	Pengenalan Program BI yakni Pilot Project BI		
<b>Total Volume Kegiatan</b>				

Sumber : data diolah (2022)

### C. Rencana Keberlanjutan Program

Seperti dikemukakan di atas pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah desa dan pelaku usaha/masyarakat desa dalam kondisi pandemi covid-19 adalah adalah tujuan jangka pendek namun kapasitas yang baik dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga desa merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Untuk keberlanjutan program perlunya mengintrodusir pelaku UMKM desa dan stakeholders pembangunan desa lainnya mengenai Aksesibilitas pasar, memberi pengetahuan pasar online dan terhubungnya ke program BOSARA “Belanja Online Sulawesi Tenggara”, serta penguatan kelompok tani melalui korporasi tani.

### D. Tempat Kegiatan

Kegiatan CSR Perusda Kab. Konawe Selatan dilakukan di Desa Lambusa. Oleh karena kegiatan dilakukan tatap muka secara langsung antara tim dan pelaku UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Geografis

Desa Lambusa terletak kurang lebih 90 KM dari Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan atau kurang lebih 850 Meter dari Ibu Kota Kecamatan Konda, Desa Lambusa sebagian besar dihuni suku Jawa & suku lain yang telah lama tinggal dan menetap. Batas – batas Desa Lambusa yakni :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pombulaa jaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebo Jaya dan Kel. Konda
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ambololi

Sedangkan luas wilayah Desa LAMBUSA mencapai : 470,5 Ha yang terdiri dari:

● Tanah Pemukiman	: 130	Ha
● Tanah Persawahan	: 150	Ha
● Tanah Perkebunan	: 10	Ha
● Tanah Pekarangan	: 123,25	Ha
● Tanah Perkuburan	: 1	Ha
● Lahan Tanaman Tadah hujan	: 54	Ha
● Lahan Perkantoran	: 0,25	Ha
● Sarana Umum Lainnya	: 2	Ha

**Tabel 2.** Lahan Produktif

Lahan Produktif	Jumlah	Persentase(%)
Tanah Persawahan	150 Ha	52,96%
Tanah Perkebunan	10 Ha	3,53%
Tanah Pekarangan	123,25 Ha	43,51%
Lahan Tanaman Tadah hujan	54 Ha	
<b>Total Lahan Produktif</b>	<b>283,25 Ha</b>	<b>100,00%</b>

Desa Lambusa Kec. Konda Kab. Konseil memiliki potensi yang utama adalah petani sayur yakni: penghasil kangkung, bayam, gambas, daun kacang, sawi, kacang panjang, pepaya, buah naga dan penghasil tahu dan tempe. Petani berasal dari penduduk lokal yang menjadikan lahan perkebunan dan persawahan sebagai sumber penghasilan utama. Desa lambusa menjadi penyuplai sayur utama kebutuhan sayur dan tahu tempe bagi kota Kendari dan sekitarnya. Rata-rata waktu panen sayur berkisar 3 minggu. Hasil panen tersebut dijual dengan berbagai metode yaitu: jual langsung secara local, dibawa secara individu ke pasar dan diborong oleh tengkulak.





Analisis produksi sayur per petani, contoh pada petani kangkung, 1 Kg dibagi menjadi 3 ikat, untuk eceran. Satu orang petani menghasilkan 160 Kg kangkung yang dikonversi menjadi 500 ikat. Harga jual dari petani adalah Rp.2000/ikat kangkung, pada kondisi sayur yang sangat baik, harga dapat di bawah Rp.2000 jika hasil panen kurang baik. Analisis situasi hasil wawancara dari petani dan kepala desa bahwa permasalahan petani memiliki ketergantungan kepada tengkulak dalam menjual hasil panennya. Hal ini menyebabkan bargaining power yang lemah dari petani sebagai penjual dalam menentukan harga.

Total penjualan sekali panen berkisar  $\text{Rp.2000} \times 500 \text{ ikat} = \text{Rp. 1.000.000}$ . sebagai ilustrasi, harga pasar kangkung adalah Rp.2500/ikat dalam hal ini tengkulak memiliki kekuatan (bargaining power) dalam menentukan harga beli dari petani dan mengambil keuntungan dari harga jual ke pengecer.

Analisis produksi tahu tempe per petani. Produsen tempe dapat mengolah dan menghasilkan sekitar 300 kg tempe/hari dan ada pula penghasil tempe yang dapat memproduksi hingga 700 Kg tempe/hari. Terdapat sekitar 25 produsen tempe di desa Lambusa. Sehingga potensi tempe yang dihasilkan dari desa lambusa adalah 7,5 ton s/d 22,5 ton.

### **B. Analisis Pasar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan kepala desa mengenai distribusi sayur dan tahu tempe ke pasar terdapat permasalahan utama adalah petani memiliki keterbatasan untuk memasarkan hasil panennya, kondisi ini dimanfaatkan oleh tengkulak yang memiliki kekuatan dan jaringan dalam distribusi hasil panen di pasar. Secara fakta hal ini merugikan bagi petani di Desa Lambusa karena harga dari tengkulak terkadang dibawah harga pasar. Perkembangan usaha dalam pasar juga masih belum maksimal. Hasil tani yang dibawah oleh tengkulak juga hanya mengandalkan pasar tradisional atau offline. Disini menggambarkan ketidaksesuaian dengan zaman.

Berdasarkan hasil analisis hasil panen sayur di Desa Lambusa rata-rata menghasilkan 160 Kg/panen. Dengan jumlah petani 25 orang maka potensi hasil panen secara total adalah maksimal 4 Ton. Kualitas sayur dari Desa Lambusa telah menjadi daya Tarik bagi kota dan kabupaten di sekitarnya, dalam hal ini Desa

Lambusa telah menerima penawaran untuk menyuplai sayur di kawasan tambang di Kab. Konawe Utara sebesar 13 Ton. Penawaran ini belum disanggupi oleh petani Desa dikarenakan hasil panen belum mencapai setengahnya dari penawaran. Jika dianalisis kesenjangan antara potensi dan realisasi hasil panen menjadi kerugian bagi Desa Lambus, kondisi ini memerlukan komitmen Bersama untuk dapat meningkatkan kapasitas petani, lahan, kualitas sayuran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Hasil wawancara dengan Petani:

1. Mayoritas berhasil setelah 22 hari panen tanaman kangkung. Tanaman kangkung berluas satu hektar menghabiskan sekitar 240 kg Bibit kangkung.
2. Peran pemerintah kabupaten terhadap program desa lambusa banyak yang tidak menyesuaikan dengan kondisi petani dan keberlanjutan terhadap desa.
3. Harga tertinggi tanaman kangkung sebesar Rp10.000 per 3 ikat tanpa penggulak.
4. Mas Rokim, seorang petani sayur, menerapkan pupuk organic yang disebut pupuk biosaka yang berasal dari kompos daun-daun tanpa bahan kimia yang disebut dari alam Kembali ke alam.
5. Mas Rokim juga mengatasi hama pada tanaman kangkungnya dengan pengasapan.
6. Terdapat juga petani yang tanahnya mengalami penyusutan kesuburan sehingga hasil panen kurang maksimal sehingga hasil panen daun kangkung terlihat rusak.
7. Beberapa kualitas panen kangkung mulai berkurang disebabkan tanah asam. Langkah awal tanam perlu diberi kapur dolomit setelah itu diberi pupuk kandang yang sudah dipermentasi terlebih dahulu kemudian diberikan cairan E empat.

### **C. Alternatif Solusi**

Untuk dapat meningkatkan produksi sayur dapat dilakukan hal-hal berikut:

1. Pembentukan Propaktani dalam pengelolaan sumber daya di desa dan program desa menjadi lebih kuat dalam produksi sebanyak 15 orang
2. Pemanfaatan lahan yang belum digarap dan intensifikasi dengan pemberian pupuk





3. Menyediakan pasar kerja petani untuk menggarap lahan dengan standar gaji yang baik.
4. Peningkatan kualitas sayur hasil panen dengan menyediakan cooling dan armada (Mobil Open)
5. Perluasan pangsa pasar ke kabupaten lain seperti konawe utara dan Baubau, juga pemasaran kerja sama oleh Bumdes ke sektor swasta seperti: hotel dan restoran.
6. Peningkatan sektor Peternakan pada penggemukkan sapi
7. Jangka Panjang : menjadikan VISI desa Lambusa menjadi Desa Agribisnis Penghasil Sayur.
8. Peningkatan kualitas pemasaran dengan bergabung menjadi mitra penyuplai pada startup “BOSARA”

### DISKUSI

#### A. Kondisi dan Kendala Hasil Pertanian Desa Lambusa

Lahan pertanian yang dikelola warga rata-rata di garap secara mandiri sebagai penghasilan keluarga, biasanya dari generasi orang tua dan dibantu oleh generasi selanjutnya. Rata-rata warga memiliki dan mengelola 500m<sup>2</sup> lahan pertanian dengan dua atau tiga jenis sayuran seperti kangkung yang paling umum, sayur daun kacang, sayur bayam, jagung. Tanaman kangkung yang dihasilkan dalam satu periode tanam sebanyak 500 ikat, pada saat panen (22 hari setelah tanam) membutuhkan perlakuan yang cepat dan segera dipanen untuk didistribusikan pada kondisi sayur yang paling baik di pasar. Seperti pada kondisi petani yang tidak memiliki kecukupan tenaga/buruh tani yang dapat membantu hasil panen akan mengakibatkan gagal panen, seperti tanaman menguning dan menurunkan nilai jual hingga 50% taksiran tengkulak. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, bahwa kesulitan dalam memperkerjakan buruh panen dengan alasan (1) biaya gaji buruh adalah 50.000 setengah hari dan itu adalah 50% dari omset penjualan. (2) Ketersediaan buruh terampil di desa sangat sulit.

Hal tersebut mendominasi kendala dalam pengembangan hasil tani yang optimal dari warga pada tanaman sayur yang sifatnya padat karya yaitu membutuhkan buruh panen yang memetic sayuran, seperti kangkung, bayam, dan



sejenisnya. Alternatif dari kelangkaan buruh panen, petani sayur beralih menanam papaya, dan jagung. Hal ini menjadi kendala utama dalam pengembangan pertanian di desa Lambusa, yaitu keterbatasan SDM buruh panen, harga beli yang rendah oleh tengkulak dan aksesibilitas petani ke pasar. Selain itu ketergantungan petani pada tengkulak dalam penjualan hasil panen yang masih berbasis pasar konvensional, kondisi tersebut sangat merugikan harga jual dan kemampuan bargain petani karena tidak mampu membawa hasil taninya ke pasar disebabkan tidak memiliki kendaraan/alat angkut dan info akses ke pasar yang telah di kuasai oleh tengkulak sehingga petani menyerah pada kondisi yang menahun seperti itu. Kondisi ini sangat mencerminkan keterbelakangan dan lemahnya petani yang memutuskan campur tangan pemerintah sebagai tanggungjawab (principle) yang diamanatkan oleh undang-undang (UU).

Salah satu yang menjadi potensi desa lambusa adalah tanaman buah papaya. Hasil tani yang dihasilkan dari siklus lima bulan perpanen dalam sebulan sebanyak enam kali. Dengan jumlah tanaman sebanyak 1000 pohon menghasilkan lebih dari 1 ton setiap panen berdasarkan pertanian pak sugeng. Disini menjadi potensi dalam peningkatan pendapatan desa dan kemajuan kemakmuran petani. Dengan jumlah petani dalam tanaman papaya hanya berjumlah dua orang di desa lambusa. Dari hasil wawancara dengan petani desa penghasil papaya, menyatakan (1) kestabilan harga terhadap tengkulak kepasar yang menetralkan tetap harga (2) ketersediaan pupuk yang terbatas secara subsidi oleh pemerintah

### **B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Hasil Pertanian**

Desa sebagai unit pemerintahan yang terkecil memiliki otonomi dalam pembangunan desa, melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pemerintah desa menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini potensi desa lambusa adalah pada hasil pertanian, peternakan dan olahan tahu/tempe. Saat ini pemerintah desa membantu warganya melalui pemberian bibit dan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah desa melalui BUMDes penggemukan sapi telah memerikan kontribusi pada PADes.

Potensi pertanian tanaman sayur perlu dioptomalkan melalui penguatan nilai jual petani, aksesibilitas pasar, subsidi pupuk dan bibit, ketersediaan Lembaga

keuangan mikro yang dapat membantu penguatan modal dan likuiditas dari petani. Hal tersebut dapat menunjang kesinambungan usaha (sustainability) dan kemandirian usaha. Dalam era VUCA dan dampak dari pandemic Covid-19 adalah pada ketidakstabilan pasar dan meningkatnya tingkat inflasi pada kedelai (bahan baku tahu/tempe) kemudian bibit, pupuk, anti hama dan kenaikan harga BBM. Selain pandemic Covid-19 terdapat juga bencana iklim (climate change) yang menjadi ancaman utama bagi sektor berbasis pertanian, sehingga mitigasi bencana resesi ekonomi dan bencana iklim bagi para petani sangat perlu bagi sektor pertanian yang sangat rentan. Pemasaran hasil pertanian pada era ini sudah sangat perlu literasi digital yang mengalihkan pasar atau jaringan pasar secara online dalam memperluas distribusi hasil tani.

## **SIMPULAN**

1. Hasil dari pendampingan desa binaan dan CSR maka terbentuklah korporasi kelompok Petani (PROPAKTANI) di Desa Lambusa sebagai langkah awal penetrasi pasar online. Pembentukan Propaktani dalam pengelolaan sumber daya di desa dan program desa menjadi lebih kuat dalam produksi sebanyak 15 orang. Pertanian sayur dan buah sudah menjadi sandaran hidup utama warga desa Lambusa. Pada kondisi era VUCA saat ini berdampak pada harga bibit, anti-hama dan pupuk. Kendala utama petani adalah pemasaran dan distribusi hasil pertanian yang dikuasai oleh tengkulak, masih berbasis pasar konvensional dan biaya upah tinggi yang menjadi kendala dalam pengembangan atau perluasan hasil tani. Penguatan dari pemerintah sangat diperlukan pada permodalan petani dan pemutusan rantai tengkulak yang dapat digantikan perannya oleh BUMDes sektor pemasaran, koperasi simpan pinjam, penguatan kelompok tani, dan penerapan teknologi pertanian seperti bantuan tractor untuk efisiensi penggarapan lahan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Desa Lambusa dalam memfasilitasi kegiatan Kerjasama Desa Binaan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.



### Daftar Peserta Korporasi Kelompok Petani

No	Nama	Jenis Tanaman Sayur
1	Supriadi	Kangkung, Bayam
2	Sugeng	Pepaya
3	Untung Dedi. S	Kangkung, Bayam, Cabai, Lengkuas
4	Abdul Yusuf	Kangkung, Bayam
5	Sarkam	Kangkung, Bayam, Daun Kacang
6	Salpol Anam	Kangkung, Bayam, Daun Kacang
7	Warto	Kacang Panjang, Sawi, Kangkung, Bayam
8	M. Solihim	Kangkung, Bayam, Daun Kacang
9	Satriadi	Kangkung, Bayam, Daun Kacang
10	Mustaji	Kangkung, Bayam, Daun Kacang
11	Muh. Sainudin	Sawi, Bayam, Pepaya, Kangkung
12	Dadang	Kangkung, Bayam, Daun Kacang
13	Aep Aprudin	Kangkung, Bayam
14	Joko Susanto	Kangkung, Bayam
15	Abdull Maruf	Kangkung, Bayam



### DAFTAR RUJUKAN

Aziz, N., Nisar, Q. A., Koondhar, M. A., Meo, M. S., & Rong, K. (2020). Analyzing the women's empowerment and food security nexus in rural areas of Azad Jammu & Kashmir, Pakistan: By giving consideration to sense of land entitlement and infrastructural facilities. *Land Use Policy*, 94, 104529.



- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2014). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. 2020. *Konawe Selatan Dalam Angka 2019*. Konawe Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. 2020. *Kecamatan Konda Dalam Angka 2019*. Konawe Selatan
- Buchari, A., Santoso, M.B., & Marlina, N (2017). *Pengembangan Kapasitas kelembagaan Desa Tangguh bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler)*. Jurnal Analisis dan kebijakan Publik. Vol.3 No 1. Juni 2017. Hal 49-62
- Pratiwi, R. (2020), Dampak Penyebaran Virus Corona, <https://www.rasio.co/dampak-covid-19-bagi-masyarakat/>.
- Maarif, Syamsul. (2015). *Sosiologi Kebencanaan dan Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Penguatan Sebagai Guru Besar Sosiologi Kebencanaan)*, Jember; Universitas Jember.
- Wikantiyoso, Respati, (2010). *Mitigasi Bencana di Perkotaan: Adaptasi dan Antisipasi Perencanaan dan Perencanaan Kota? (Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana)*. Local Wisdom. Vol. 2. No.1 Hal 18-19, Januari 2010.

### LAMPIRAN

#### Dokumentasi

